

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hakikat Nasionalisme

Nazaruddin Syamsudin memaknai nasionalisme sebagai suatu konsep yang berargumen bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara.¹ Berlainan dengan pandangan Sartono Kartodirjo yang mengemukakan bahwa nasionalisme memuat tentang kesatuan (*unity*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), demokrasi, kepribadian nasional serta prestasi kolektif.²

Sedangkan dalam perspektif Soekarno, nasionalisme merupakan sarana untuk menjunjung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Munculnya nasionalisme tersebut dilatar belakangi oleh dua hal penting yang saling berkesinambungan, berkorelasi. Dua hal tersebut antara lain ialah adanya keinginan suatu bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan (kolonialisme) dan adanya rasa persatuan dan cinta tanah air tanpa menonjolkan perbedaan yang ada dalam masyarakat.³

Selain itu, Soekarno juga menegaskan bahwa spirit persatuan dan kesatuan adalah fundamen yang dapat menghantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang bersifat humanis, yang mampu memberikan kebebasan kepada manusia Indonesia untuk dapat

¹Nazaruddin Syamsudin, *Bung Karno Kenyataan Politik dan Kenyataan Praktek*, (Jakarta: VC. Rajawali, 1988), hlm. 37

²Sartono Kartodirjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 60

³Winner Silaban, *Pemikiran Soekarno...*, hlm. 8

mengekspresikan diri secara baik, tanpa menyisihkan pluralitas konkret yang ada di nusantara.

Dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pendefinisian Sartono Kartodirjo dan Ir. Soekarno tersebut menampilkan titik temu yang jelas deterministik pada kesatuan dan persatuan. Dimana kesatuan dan persatuan menjadi fundamen penting tercetusnya sikap nasionalis yang dimiliki oleh setiap personal yang mencita-citakan kehidupan bersama.

Sikap nasionalis yang muncul dan berkembang menjadi sebuah paham (*isme*) dijadikan sebagai landasan hidup dalam bernegara, bermasyarakat dan berbudaya sangat dipengaruhi oleh kondisi histori dan dinamika sosio-kultural. Nasionalisme akan muncul ketika suatu kelompok suku yang hidup primordial berhadapan dengan kelompok lain yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka. Proses interaksi sosial yang terjadi secara tidak seimbang, seperti ditandai dengan adanya proses kooptasi, diskriminasi dan eksploitasi antara yang satu terhadap yang lain menjadi penyebab timbulnya nasionalisme.

Gejolak periodisasi histori berkontribusi penting dalam merumuskan pemahaman dan pemaknaan tentang konsep nasionalisme yang tidak mampu

⁴*Ibid.*, hlm. 7

terelakkan telah mengalami ujian zaman. Dalam perspektif sejarah kuno tidak diketahui secara pasti mengenai konsep nasionalisme, tetapi ada beberapa tokoh yang bisa disebut sebagai pencetus teori nasionalisme telah muncul sekitar abad ke XVIII (yang dikenal dengan zaman modern), seperti Von Herder (1774 – 1803), Rousseau (1712 -1778) dan Fiederich Hegel (1770 - 1831) yang terkenal dengan teorinya tentang negara. Mereka ini sering disebut sebagai nabi negara nasional, dengan teorinya tentang bangsa.⁵

Von Herder (1774 – 1803) mengatakan bahwa, kebutuhan pokok manusia untuk menjadi anggota suatu kelompok setidaknya-tidaknya pada suatu tingkat kelompok itu merupakan bangsa. Menjadi bagian dari suatu bangsa, maka nasionalisme memberikan kita suatu identitas, bangsa kita mempunyai masa lalu, suatu sejarah nenek moyang “akar-akar” yang menempatkan kita dalam suatu tradisi. Lebih lanjut dikatakan Von Herder bahwa “kebutuhan manusia yang paling mendasar ialah membentuk suatu kelompok”. Pada tingkatan tertentu kelompok ini adalah bangsa. Suatu bangsa terbentuk melalui “arus tradisi yang terdiri dari satu wilayah, satu sejarah, satu bahasa dan sering satu agama”.⁶

Rousseau mengatakan bahwa seorang individu tidak punya makna sama sekali dalam negara nasional.⁷ Sementara itu Hegel mengatakan bahwa fungsi negara sebagai representasi Tuhan. Negara memiliki kualitas spritual sehingga seorang individu hanya mengadili, merealisasikan dirinya, mencapai

⁵Francis Fukuyama, *The End Of History and The Last Man* (Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal), (Yogyakarta: C.V Qalam, 2004), hlm. 3

⁶Ahmad Safii Maarif, *Peran Sejarah dalam Perkembangan Bangsa Indonesia*. (Makalah Dies Natalis IKIP Wates), (Yogyakarta: 1987), hlm. 7

⁷*Ibid*, hlm. 28

kesempurnaan, menjadi bebas bila tunduk secara total kepada negara, negara adalah gagasan ketuhanan sebagaimana “ia berwujud dimuka bumi”.⁸

Dapat digaris bawahi bahwa timbulnya semangat nasionalisme secara objektif dapat disebabkan karena adanya integritas dari beberapa unsur-unsur pokok sebagai berikut, yaitu bahasa, ras, etnik (rasa kekeluargaan yang melatar belakangi timbulnya hubungan yang erat antara sekelompok orang dengan orang lain), agama, peradaban, wilayah, Negara dan kewarganegaraan (rasa terikat pada suatu kekuasaan).⁹

Integritas yang berdasarkan rasa keterikatan, jelas tidak semata-mata menjadi sekadar ada. Melainkan mendongkrak hadirnya tuntutan persamaan hak bagi setiap orang untuk memegang peranan dalam kelompok atau masyarakat, entah itu dalam berpolitik, berkehidupan sosial dan kepentingan ekonomi. Hadirnya tuntutan inilah yang kemudian melahirkan ikatan emosional diantara anggota kelompok masyarakat yang pada akhirnya memproyeksikan imajinasi bersama. Imajinasi kolektif tentang suatu bangunan masyarakat inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah nasionalisme di zaman modern.

Barang kali menjadi benar apa yang dikemukakan Benedict Anderson dalam karya fenomenalnya, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (1991), bahwa identitas asli bangsa sebagai suatu “komunitas bayangan”, yang lahirnya seiring dengan matinya feodalisme dan

⁸*Ibid*, Francis Fukuyama, hlm. 17

⁹Hal demikian senada dengan yang penjelasan Winner Silaban, *Pemikiran Soekarno Tentang Nasionalisme*, Jurnal Dinamika Politik: Universitas Sumatera Utara Medan, Vol. 1, No. 3, Desember 2012, hlm. 1 pdf.

bangkitnya kapitalisme. Hierarki-hierarki feodal memungkinkan terjadinya ikatan-ikatan dalam melintasi batasan nasional dan linguistik. Akan tetapi hierarki kuasa borjuis telah lebih jauh melampaui batas. Komunikasi interaktif melalui media massa, karya dan bentuk-bentuk yang lain menjadi kapitalis cetak. Menjadi sistemasi saluran yang disortir untuk menciptakan budaya, kepentingan dan kosakata bersama yang dibakukan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kovergensi kapitalisme dan teknologi cetak menjadi oposisi binner terhadap keragaman bahasa manusia memungkinkan terciptanya komunitas bayangan baru, yang dalam genealoginya mempersiapkan kelahiran identitas bangsa modern.¹⁰

Ideologi '*imagined Communities*' yang menjadi buah pemikiran Aderson nampaknya mendapat perhatian serius pada zamannya. Bukan produk stagnan yang hanya diakuisisi dalam pemikiran Aderson, melainkan menjadi ideologi estapet yang digeluti atas keberadaannya. Hal yang demikian menjadi *real* tatkala Chatterjee melanjutkan tesis Aderson melalui karya *The Nations and Its Fragments*.

Menurutnya, jika nasionalisme di dunia selebihnya harus memilih komunitas bayangan mereka dari bentuk-bentuk "modular" tertentu yang sudah disediakan untuk mereka oleh Eropa dan Amerika, apalagi yang harus mereka bayangkan? Sejarah tampaknya telah menetapkan bahwa kami di dunia pascakolonial hanya akan menjadi konsumen abadi modernitas. Eropa dan Amerika, satu-satunya subjek sejati sejarah, telah menyelesaikan untuk

¹⁰Penjelasan ini seirama dengan pernyataan Bennedict Aderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (London and New York: Verso, 1991), hlm. 46

kami bukan saja skenario pencerahan dan eksploitasi kolonial, tetapi juga skenario perlawanan antikolonial kami dan kesengsaraan pascakolonial kami. Bahkan imajinasi-imajinasi kami harus tetap dijajah selamanya.¹¹

Melalui bayangan imajiner, Chatterjee berusaha mengidentifikasi adanya suatu proses “saringan ideologis” sekaligus ingin membuktikan bahwa nasionalisme yang terjadi di India tidak semata-mata meniru produk antikolonialisme (gerakan politis yang menentang negara kolonial), melainkan juga dengan cara mendefinisikan kembali nasionalisme sebagai domain kedaulatannya sendiri di dalam masyarakat kolonial. Melalui kegigihan usaha untuk mengemukakan perbedaan dan otonomi mereka dengan gagasan-gagasan Barat mengenai kebebasan, kemerdekaan dan kehormatan manusia. Polarisasi ideologi dua dunia (kolonialisme-antikolonialisme) seperti itu yang secara universal menjadi rumusan dalam pemaknaan dan pemahaman nasionalisme oleh Asia dan Afrika.

Kesadaran dan kemandirian pribumi menjadi jelas dengan keberpihakan sudut pandang postmodern yang menyatakan bahwa gerakan nasionalisme mengakar pada entitas yang melekat pada pendirian dan kedirian manusia yang memiliki keragaman identitas, pola pikir, tata laku, dan pedoman hidup yang membedakannya dengan yang lain. Oleh karena itu tidak ada satu bangsapun yang dapat “mereduksi” bangsa lainnya karena alasan ketidakmampuan, kurang berdaya atau lebih rendah dari bangsanya.¹²

¹¹P. Chatterjee, *The Nations and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*, (Princeton, NJ: Princeton University Press), hlm. 5

¹²I Nengah Suastika, *Nasionalisme dalam Perspektif Postmodernisme, Poststrukturalisme dan Postkolonialisme*, Media Komunikasi, FIS Vol. 11 .No 1 April 2012, hlm. 42.pdf

Nampaknya pemahaman tentang nasionalisme yang disampaikan Anderson dan Chatterjee menjadi fundamen, harus termaknai sebagai jiwa dan semangat yang membentuk ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Perjuangan nasionalisme adalah untuk melepaskan diri dari aneka bentuk ikatan dan dominasi kekuasaan sosial dan politik lama, seperti suku bangsa, raja feodal, dinasti, untuk kemudian menyerahkan kekuasaan tertinggi pada negara kebangsaan yang sesuai dengan cita-cita kaum pribumi. Hal yang demikian selaras dengan bahasa “*mind idea*” Ania Loomba, yang menyatakan bahwa perjuangan-perjuangan antikolonial harus menciptakan identitas-identitas baru yang kuat bagi rakyat-rakyat terjajah, dan menentang kolonialisme bukan saja pada tingkat politik atau intelektual, tetapi juga pada tingkat emosional. Karena secara fundamental gagasan bangsa merupakan wahana yang sangat ampuh (kuat) untuk mengintegrasikan energi-energi antikolonial dalam berbagai hierarki konteks, gagasan.¹³

Namun dalam menyikapi problematika tentang konsep nasionalisme dalam ajaran Kapribaden yang merupakan bagian dari kepercayaan yang berdimensi lokalitas, nampaknya akan menjadi sangat kurang relevan bila dikaji melalui kacamata nasionalisme tokoh ilmuan barat. Mengingat ideologi lokus pewacauan nasionalisme yang ada di dunia barat tentu berbeda jauh dengan realita nasionalisme tokoh lokal yang ada di Indonesia, maka di sinipun secara eksplisit peneliti berusaha menjadikan ide nasionalisme Ir.

¹³Ania Loomba, *Kolonialisme/Pasca-kolonialisme*, terj. oleh Hartono Hadikusumo, (Jogjakarta: Bentang Budaya, 2003), hlm. 240, judul buku asli *Colonialism / Postcolonialism*, New York: Routledge, 2000.

Soekarno sebagai tumpuan dasar dalam meninjau persoalan yang akan dikaji. Pendek kata, menjadikan paradigma berpikir nasionalisme Ir. Soekarno sebagai fundamen dalam mewacanakan persoalan.

Berkaitan dengan hal yang demikian, Ir. Soekarno menegaskan bahwa:

“Nasionalis yang sejati, yang cintanya kepada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, nasionalis yang bukan *chauvinis*, tak boleh tidak haruslah menolak segala macam pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, nasionalisme yang bukan semata-mata copy atau tiruan dari Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalisme yaitu sebagai wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat kepada sesuatu yang lain-lain, sebagai lebar dan luasnya udara yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup”.¹⁴

Secara seksama, harus dipahami pula bahwa pada umumnya bangsa terjajah melakukan penyaringan dalam menegaskan imajinasi nasionalisme sebagai gerakan politis yang menentang pejahah sekaligus menandakan kesadaran-mandiri yang diperlukan oleh masyarakat pribumi sebagai identitas baru. Ruh model penyaringan ideologi demikian yang dinahkodai Bung Karno (1901-1970) sebagai representasi tokoh kepercayaan masyarakat pribumi dalam meramu konsep nasionalisme Indonesia yang bersifat antikolonialisme.

Lebih jauh dapat dikatakan bahwa terdapat proses kawin silang antara gerakan politis antikolonialisme dan semua elemen pluralitas masyarakat

¹⁴Yuli Hananto, *Bermuka Dua: Kebijakan Soeharto terhadap Soekarno Beserta Keluarganya*. (Yogyakarta: Ombak, 2005), hlm. 35

pribumi yang ada, nyatanya memakan paruh waktu yang cukup panjang. Konstruksi nasionalisme Indonesia bukanlah semata-mata konsep yang menjadi proyeksi dari produk kolonialisme. Melainkan konsep asimilatif muatan lokal (warisan tradisi-ajaran nenek moyang) yang digali dari serpihan deret sejarah yang diimajinasikan oleh masyarakat pribumi.

Dalam khalayak masyarakat Jawa, "*mind idea*" nasionalisme terrepresentasikan jelas dalam pandangan hidup sehari-hari, yakni melalui cara hidup *guyub rukun*, dan yang demikian adalah warisan leluhur.

Nasionalisme juga mengalami asimilasi secara elaborasi dengan normativitas agama dan kepercayaan masyarakat Jawa. Dalam konteks ini difokuskan pada kalangan Paguyuban Penghayat Kapribaden, yang merupakan salah satu model ideal dalam khazanah kepercayaan lokal selain dari kelompok mistik-sintesis dan Islam kejawen yang menginjeksikan ide nasionalisme ke dalam tubuh keyakninan mereka.

B. Implementasi Nasionalisme dalam Kehidupan Sosial

Bentuk implementasi nasionalisme dalam kehidupan sosial secara mendasar tidak lepas dari upaya peran pemerintah dalam memahamkan istilah nasionalisme pada khalayak umum setiap warga negara masyarakat Indonesia yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme telah menjadi agenda yang dideklarasikan oleh pemerintah.

Peneliti memandang bahwa hadirnya proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme secara eksplisit teranalogikan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila yang diinjeksikan melalui pendidikan kewarganegaraan. Dalam artian adanya suatu usaha untuk mengkonstruksi kesadaran pribadi melalui pemahaman sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ruh model nasionalisme, sehingga nantinya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

Periodisasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam ruang lingkup kesejarahan Indonesia, nyatanya mengalami gejolak yang luar biasa. Bermula pada masa Orde Lama (pemerintahan Ir. Soekarno) yang berusaha menerapkan paradigma *nation and character building* melalui Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan sebagai suatu upaya mengindonesiakan orang Indonesia yang diselaraskan dengan visi dan misi politik pemerintahan tatkala itu. Bahkan secara serius paradigma *nation and character building* tersebut dibakukan dalam pendidikan formal melalui mata pelajaran *civics*.¹⁵

Selanjutnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme pada masa Orde Baru (pemerintahan Soeharto) lebih fokus pada jalur pendidikan formal, yakni melalui mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewargaan Negara) yang kemudian diperjelas dengan keluarnya kurikulum 1975 dan mengganti mata pelajaran PKN dengan PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Sebagai upaya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang lingkup yang lebih luas diberbagai lapisan masyarakat maka pada masa Orde Baru ditetapkan P4

¹⁵Bunyamin Maftuh, *Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Educationist: Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. II No. 2 Juli 2008, hlm. 135

(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 juga berpengaruh pada kebijakan kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Hal demikian Nampak ketara dari kurikulum PMP tahun 1984 dan kurikulum PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). P4 juga dijadikan sebagai bahan penataran siswa maupun mahasiswa baru.¹⁶

Sedangkan pada masa reformasi, internalisasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme ditandai dengan pencabutannya ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan dibubarkannya BP-7 (Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Penghayatan Pancasila) yang digantikan dengan Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara sekaligus disertai pergantian kurikulum PPKn dengan kurikulum PKn tahun 2004 dan 2006 yang berbalut konseptual teoritis, dan selaras dengan visi-misi politik orde reformasi.¹⁷

Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang digalakan pemerintah sebagai upaya menaruh kesadaran personal dalam memahami dan menanamkan nasionalisme, nampaknya sekadar bermuara pada sibuknya perbaikan teoritis dalam lembaga pendidikan formal tanpa melirik bagaimana realita praksis.

Nampaknya di sinipun tidak menjadi salah, bila meninjau kembali pengaplikasian poin-poin penting yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana yang terdapat dalam P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai bahan pertimbangan implementasi

¹⁶Bunyamin Muftah, *Internalisasi Nilai-nilai...*, hlm. 136

¹⁷*Ibid.*

nasionalisme dalam kehidupan sosial, meskipun secara legalitas hukum P4 telah dicabut pada masa reformasi melalui ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan kembali Pancasila sebagai dasar negara.¹⁸

Berdasarkan ketetapan MPR No. II/MPR/1978, P4 secara proporsional menjelaskan fungsi dari lima asas Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praksis Pancasila dalam kehidupan sosial. Diantara penjelasan tersebut ialah sebagai berikut:¹⁹

Pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” ditafsirkan menjadi empat pengaplikasian dalam kehidupan sosial. Keempat tafsiran tersebut ialah:

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat-menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

¹⁸Winarno, *Mengungkap Kembali Tafsir atas Pancasila: dibalik Pencabutan Ketetapan MPR Tentang P4*, Jurnal Forum Ilmu Sosial, UNS Surakarta, Vol. 39 No. 2 Desember 2012, hlm. 185

¹⁹Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang dijabarkan menjadi delapan poin sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Ketiga, sila “Persatuan Indonesia” yang diuraikan menjadi lima poin penting dalam menjalani relaitas kehidupan sosial, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
3. Cinta tanah air dan bangsa
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Keempat, sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” mengejawantahkan tujuh penjabaran sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan i'tikad baik rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Kelima, sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diuraikan menjadi dua belas tafsiran sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dalam prosesnya, uraian 36 butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7 (Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Penghayatan Pancasila) ialah menegaskan butir-butir pancasila sebagai berikut:²⁰

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” diuraikan menjadi tujuh butir sebagai berikut:

²⁰Silahkan lihat di website, “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” dalam <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada Senin, 05 Juni 2017 pukul 06.00 wib

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” diuraikan menjadi sepuluh butir sebagai berikut:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tengang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga “Persatuan Indonesia” dijabarkan menjadi tujuh butir tafsiran sebagai berikut:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” dijabarkan menjadi sembilan butir sebagai berikut:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan i'tikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dijabarkan menjadi sebelas butir sebagai berikut:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan daya guna hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Secara eksplisit pendeskripsian butir-butir Pancasila yang lepas dari labelitas dan stigma politisasi pada masa orde baru menghilirkan simpulan pemahaman bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara universal mencerminkan implementasi nasionalisme dalam kehidupan sosial.

Bentuk implementasi nasionalisme dalam kehidupan sosial dari masa ke masa terus menyesuaikan dengan periodisasi pemerintah pemegang tampuk kekuasaan. Akibatnya tidak segan-segan, revitalisasi bentuk-bentuk implementasi nasionalisme yang salah satunya difokuskan melalui internalisasi Pancasila, belum terpahami betul sebagai kesadaran dalam berbangsa dan bernegara pun terus tergerus dengan perubahan kebijakan yang digencarkan.

Terlebih-lebih lagi jika kita merenungi keadaan Pancasila belakangan ini dari kaca mata kontemporer. Sikap apatis bahkan sampai sikap anti Pancasila tumbuh menjadi protein yang setiap hari hampir dinikmati. Suara-suara sumbang dari timur berusaha untuk menstimulus berbdirinya negara

yang berbasis agama. Jelas yang demikian berseberangan dengan ideologi negara-bangsa yang diramu melalui kesepakatan bersama, yang di plopori oleh Ir. Soekarno. Sangat ketara, di era ini pun memerlukan revitalisasi internalisasi pancasila sebagai bentuk implementasi nasionalisme dalam kehidupan sosial.

Akan tetapi realitasnya, implementasi nasionalisme dalam kehidupan sosial tidak sekadar bertumpu pada Pancasila semata, melainkan juga disertai dengan pengamalan UUD 1945 dan falsafah hidup Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan pedoman hidup sekaligus mewujud sebagai kontrol sosial setiap warga masyarakat indonesia dalam konteks kontinuitas kehidupan bernegara dan berbangsa.

C. Paguyuban Penghayat Kapribaden

1. Perkembangan Penghayat *Panca Gaib* di Indonseia

Penghayat *Panca Gaib* di Indonesia jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit, sebab sejak 1963 sudah mencapai 40.000 orang pengikut. Agar tidak punah, maka perlu dilestarikan keberadaannya.

Berdasarkan Sabda Romo Herucokro yang ditulis dalam bahasa jawa, yang artinya: “Romo merestui, Putro-putro harus mengakui Putro Romo”, maka dibentuklah organisasi penghayat *Paca Gaib* dengan nama “Paguyuban Penghayat Kapribaden” yang diresmikan oleh Letjen Amir Murtono di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 30 Juli 1978 dengan Romo Herucokro Semono sebagai sesepuh-nya.

Diusianya yang tergolong masih muda, Paguyuban Penghayat Kapribaden sudah 3 kali melakukan Sarasehan Agung atau musyawarah nasional. *Pertama* diselenggarakan di Cilacap Jawa Tengah, yang bertujuan sekaligus napak tilas pada waktu pemuda Semono melakukan tapa brata selama 3 tahun digoa Singa Barong. *Kedua* diselenggarakan di TMII Jakarta pada tanggal 28-30 April 1994. *Ketiga* atas dasar permintaan pemerintahan Indonesia supaya memaparkan ajaran *Wulan Wuruk* Romo Herucokro Semono, yang diselenggarakan di Hotel Purnama, Cipayung-Bogor pada 20-22 September 1988.

Pemaparan dilakukan oleh 3 kelompok umur, yaitu anak-anak usia 9 tahun, remaja dan orang tua yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, yang diantaranya ialah DIRJEN DIKBUD, Kejaksaan, SOSPOL dan POLRI serta perwakilan dari Agama.

2. Hikayat Sang Pembawa Wangsit

Bila ditelusuri secara nasbiah, semua bermula sebelum tahun 1900, dimana seorang isteri *padhemi* (isteri resmi) “dibuang”, diberikan kepada seseorang yang dinilai berjasa. Hal itu terjadi karena desakan seorang selir yang sangat dicintai sang suami. Hal yang demikian menjadi sangat lumrah pada zaman itu. Isteri yang dibuang tersebut bernama Dewi Nawang Wulan. Tatkala itu kepergiannya didampingi oleh seorang dayang yang bernama Ratnamsari.

Seorang yang dinilai berjasa tersebut ialah Ki Kasandikromo, yang sering dipanggil dengan sebutan Ki Kasan Kesambi. Seorang tokoh spiritual yang masyhur pada zamannya. Beliau berdomisili di desa Kalinongko Gunung Damar, Kecamatan Loano, Kabupaten Purwarejo, Jawa Tengah.²¹

Semenjak Dewi Nawang Wulan diberikan dan berpindah tempat tinggal ke kediaman Ki Kasandikromo, ia tetap dianggap dan diperlakukan sebagai ratunya bukan sebagai isterinya. Begitu halnya dengan isteri resmi Ki Kasandikromo yang memperlakukan Dewi Nawang Wulan sebagai ratu yang harus dilayaninya.²²

Tatkala “dibuang”, kebetulan Dewi Nawang Wulan dalam keadaan mengandung. Tidak lama kemudian pada hari Jum’at Pahing 1900, lahirlah seorang bayi yang diberi nama Semono. Telah menjadi sesuatu hal yang lumrah pada zamannya, mengenai tanggal dan bulan kelahiran tidak dicatat secara resmi. Tatkala Semono masih kecil, ibunya, Dewi Nawang Wulan wafat. Tidak lama kemudian disusul oleh dayangnya, Ratnamsari yang juga meninggal dunia. Keduanya dimakamkan di puncak Gunung Damar, Purwarejo. Akhirnya, Semono dibesarkan dalam pengawasan Ki Kasandikromo. Tatkala itu Semono disekolahkan di sekolah Ongko Loro (SD yang lima tahun tamat untuk pribumi).²³

²¹Petir Abimanyu, *Buku Pintar...*, hlm. 160

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

Semasa sekolah, Semono memiliki suatu kebiasaan yang unik, yakni membolos setiap hari Selasa Keliwon dan Jum'at Keliwon. Alasan logis kebolosan tersebut ialah bukan karena kemalasan atau kenakalan yang melekat pada dirinya, melainkan karena malu. Sebab, disetiap dua hari tersebut, pada saat matahari tepat di atas (sebagaimana posisi matahari pada pukul dua belas, yakni tepat di atas, vertikal dengan benda yang dibawahnya), di mana pada saat itu semua orang tidak ada banyangnya, justru ia mempunyai 12 bayangan. Inilah yang kemudian menjadi bahan tontonan teman-teman sebayanya, sehingga Semono memilih untuk membolos sekolah pada setiap Selasa Keliwon dan Jum'at Keliwon karena malu. Setelah tamat sekolah dasar (SD), Semono pun langsung diangkat menjadi guru bantu.

Suatu hari, pemuda Semono yang pada saat itu masih berusia 14 tahun (sudah dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa pada zaman itu), disuruh Nyai Kasan untuk mengambilkan minyak di salah satu bilik rumah mereka. Ternyata, di dalam bilik itu terdapat seorang gadis kemenakan Nyi Kasan. Dalam kenikmatan tidur pulasnya, kain yang dipakai gadis itu tersingkap, jadi ada bagian tubuhnya yang terlihat. Melihat yang demikian, roma disekujur tubuhnya Semono pun berdiri. Kemudian ia merenung. Mempertanyakan, tentang apa sebenarnya yang menggerakkan bulu-bulu tubuhnya itu. Renung demi renung tidak juga menemukan jawaban, memberi titik terang tentang persoalan yang dipertanyakan.

Akhirnya Semono memberanikan diri memutuskan, meminta izin Ki Kasan untuk pergi bertapa. Semono yang tatkala itu baru berusia 14 tahun bertapa di tepi laut Selatan di Cilacap. Bekasnya (petilasan) masih ada, berupa dua rumpun bamboo di dalam kompleks Pertamina. Sekalipun sudah berusaha dengan berbagai cara, Pertamina tidak bisa membongkar kedua rumpun bambu tersebut.

Semono bertapa selama 3 tahun (1914-1917). Hasilnya ia mendapat “*Cangkok Wijaya Kusumo*” yang berbentuk seperti bunga kering, berwarna coklat kehitaman. Kalau dimasukan air, maka ia akan mengembang sebesar tempatnya. Namun Semono kecewa, karena bukan itu yang dicari. Kemudian, ia mendapat wangsit (ilham) untuk melanjutkan *laku* sampai tahun kembar 5 (yang dimaksud tahun 1955) dan di timur nantinya akan ia temukan apa yang dicari. Baju yang dikenakan Semono selama 3 tahun bertapa hancur tak tersisa, sehingga hanya bercawat dedaunan (mengenakan celana dalam dari dedaunan), Semono pulang berjalan kaki. Tatkala malam menyapa ia berjalan, namun ketika siang menghampiri ia bersembunyi, disebabkan malu dan takut bertemu orang.²⁴

Sesampai di rumah, bukannya dirayakan, justru disambut hangat oleh lubang (*luweng*) yang sudah disediakan. Lalu pemuda Semono oleh Ki Kasan ditanam (*dipendem*) selama 40 hari 40 malam, hanya

²⁴Petir Abimanyu, *Buku Pinter...*, hlm. 162

beri batang gelagah untuk bernafas dan setiap usai menanak nasi, Nyi Kasan mengepulkan asap nasi itu ke dalam lubang gelagah.

Selanjutnya, sambil menjadi Marsose (sekarang Marinir), Semono berkelana menjalani *laku*. Kalau siang menjelang Semono dinas, malamnya berendam di laut, menjala. Hal itu dilakukan sampai tahun 1955.

Tanggal 13 malam 14 November 1955, kebetulan jatuh pada malam Senin Pahing, pukul 18.05, banyak orang di Perak, Surabaya, terkejut menyaksikan rumah Letnan KKO (sekarang, Letnan satu Marinir), terbakar. Tetapi setelah didekati ternyata bukan api, melainkan cahaya. Bahkan ada kereta keemasan (kereto kencono) di langit yang turun masuk ke rumah Letnan Semono, di jalan Perak Barat No. 93 Surabaya. Peristiwa itulah yang disebut dan dikenal sebagai mijilnya Romo Herucokro Semono.

Saat mijil, Semono berkata, “*Ingsun mijil, arso nyungsang bawono balik, arso nggelar jagat anyar*”, *ingsun* (bukan aku) *mijil* hendak memutarbalikkan *jagad*, (maksudnya memutarbalikkan jagat kecil, manusia atau *micro cosmos*) dan hendak menggelarkan dunia baru *micro cosmos*. Dalam artian kalau selama ini kita selalu memperbudak hidup, selanjutnya terbalik, kita sebagai manusia akan menjadi abadinya hidup.

Sejak saat itu, Romo Herucokro Semono memberikan kepada siapapun yang menghendaki (tidak ada paksaan, tidak menakut-nakuti

dengan cara dan jalan apa pun) yang ingin hidup bahagia (*tentrem*) agar bisa mencapai kasampurnan jati (moksa) pada saatnya. Romo Herucokro Semono, selanjutnya memberikan *laku kasampurnan* ini sesudah dinas. Hal ini berlangsung sampai tahun 1960, ia menjalani pensiun sebagai Kapten Marinir.

Lalu pulang ke Purworejo dan berdiam di kalinongko dan Sejiwan, Loano, Purwarejo (dua rumah kediaman). Setiap hari ia menerima kedatangan rata-rata 500 orang lebih. Pada waktu makan tiba, semua orang yang datang diberi makan dan menginap dengan bebas mencari tempat untuk tidur di dalam rumahnya. Orang yang berdatangan tentunya ada keperluan, mulai dari meminta pengobatan penyakit akut, memohon restu untuk sesuatu dan lain-lain. Tetapi kebanyakan dari mereka datang untuk memohon agar bisa mengikuti *laku kasampurnan* (memohon restu diperkenan untuk menjadi Putro). Hilir mudik orang berdatangan dari berbagai penjuru dunia atas dasar berbagai sebab, yang pada akhirnya menjadi Putro.

Selama kurun waktu 25 tahun lebih (13, malam 14 November 1955 s/d 3 Maret 1981), Romo Semono sibuk melayani, mulai dari pagi, siang, sore, malam dan dini hari siapa pun yang datang bertamu, semuanya diperlakukan secara sama. Stratifikasi sosial tidak berarti apa-apa bagi beliau. Derajat, pangkat, kekayaan, kedudukan sosial, suku dan bangsa semuanya diperlakukan secara adil, sama.²⁵

²⁵Petir Abimanyu, *Buku Pintar...*, hlm. 164

Apabila beliau sedang memberikan petuah (*wulang-wuruk*), setiap orang yang mendengar menurut bahasanya masing-masing. Orang Jerman mendengar beliau berbicara menggunakan bahasa Jerman, yang orang Inggris mendengar beliau berbahasa bangsa ibunya, Inggris. Sedangkan orang Jawa mendengar beliau berbahasa Jawa.

Romo Semono memiliki norma unik terjaga dalam memenuhi kebutuhan primer. Setiap hari, beliau makan dua kali, tetapi tiap kali makan, hanya satu sendok. Beliau hampir tidak pernah tidur dan hampir tidak pernah mandi, tetapi sedikit pun badannya tidak berbau dan tidak berdaki. Tubuhnya tetap sehat, gagah, tinggi besar.

Diantara beberapa hal luar biasa yang pernah beliau lakukan, misalnya yang terjadi sekitar tahun 1960, beliau menyebrang ke Madura, dengan naik sepeda motor militer di atas laut Jawa. Kalau mengemudi mobil, tangan dan kakinya dilepas dan mobil dikomando dengan ucapan. Beberapa kali orang menjadi saksi, tatkala beliau menghidupkan orang yang telah dinyatakan mati oleh dokter dan siap dikubur. Bahkan beliau sering berada di beberapa tempat pada saat yang bersamaan. Setiap kali beliau bercerita kepada ratusan orang yang menghadapnya, semua pertanyaan dan persoalan yang ada dibenak hadirin yang hadir sudah terjawab semua seiring dengan selesainya cerita Romo Semono.²⁶

²⁶Hal senada dengan penjelasan yang di kemukkan oleh Petir Abimanyu, *Buku Pintar...*, hlm. 165

Romo Herucokro Semono wafat pada 3 Maret 1981, dan dimakamkan di Kalinongko, Loano, Purwarejo. Beliau tidak dikarunia anak. Akan tetapi meninggalkan ratusan ribu, atau bahkan mungkin jutaan Putro, yang tersebar dimana-mana. Peninggal beliau yang paling berharga bagi khalayak adalah sarana-saran gaib bagi mereka yang berkeinginan untuk hidup bahagia (*tentrem*) agar mendapat dan mencapai “*kasampurnan jati*” pada saatnya masing-masing.²⁷

Ajaran yang dihayati dan diamalkan serta diberikan kepada siapa pun yang menghendaki tanpa memberlakukan stratifikasi sosial, dalam artian secara universal menjadi peninggalan beliau yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh putro-putronya.

3. Berdirinya Paguyuban Penghayat Kapribaden

Setelah Romo Herucokro Semono Sastrohadidjojo berhasil menjalani seluruh *laku* mencari *pepadang* selama 41 tahun (1914-1917 + 1955), maka pada tanggal 13 malam 14 November 1955, beliau Mijil. Setelah tahapan sebelumnya lengkap menerima wahyu, berupa *Panca Gaib* yang terdiri dari *Kunci*, *Asmo*, *Mijil*, *Singkir* dan *Paweling*. Beliau mendapat tugas agar memberi *pepadang* kepada sesamanya dengan mengenalkan hidup manusia yang ada di dalam raganya, agar dapat menerima petunjuk dan tuntunan hidup, dapat mengikuti jalannya

²⁷Lihat situs website resmi Paguyuban Penghayat Kapribaden, www.kapribaden.org tentang Romo Herucokro Semono, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 19:45

hidup, menuju ke sumber hidup, *Gusti Inkgang Moho Suci*, Tuhan Yang Maha Esa.²⁸

Tahun 1955-1977 menjadi periodisasi putro awal untuk mereka yang menerima Panca Gaib dan menghayati serta mengamalkan *Laku Kasampurnan Manunggal Kinantenan Sarwo Mijil* itu terlepas masing-masing, hanya terkait secara batin, yaitu rasa, sebagai *Kadhang*.

Kemudian pada tahun berikutnya, yakni tanggal 29 April 1978, Romo Semono memerintah kepada Putro-putronya untuk membentuk wadah yang diberi nama Paguyuban Penghayat Kapribaden. Tepat pada tanggal 30 April 1978, Paguyuban Penghayat Kapribaden akhirnya diresmikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Mayjen TNI (Pur) Amir Murtono, S.H,²⁹ yang bertempat di Balai Mataram Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Setelah itu, kemudian ada usaha ekspansi-eksistensi untuk membentuk dan mengukuhkan Paguyuban Penghayat Kapribaden di berbagai daerah. Meskipun dengan sadar, tatkala itu keterbatasan dana menjadi kendala prioritas yang tidak dapat terlampaui. Sehingga sampai sekarang baru dapat dibentuk di tujuh provinsi yang sudah terdaftar sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 1985, Peraturan Pemerintah

²⁸Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam paparan makalah pegangan, pedoman Paguyuban Penghayat Kapribaden, hlm. 4

²⁹Pada waktu itu belum ada UU tentang PARPOL GOLKAR

No. 18 tahun 1986, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 5 tahun 1986.

a. Eksistensi Sebelum diakui secara Resmi

Kebijakan masa pemerintahan Orde Baru kala itu yang masih melarang keberadaan Putro Romo menjelma sebagai tantangan sekaligus ancaman, sehingga tatkala itu pun dapat dikatakan sebagai momentum yang sangat berat dan sulit. Argumentasi logis yang melatar belakangi kebijakan larangan atas keberadaan Putro Romo pun akhirnya baru diketahui, ialah dikarenakan Bung karno adalah Putro Romo. Romo Semono pun dicap sebagai gurunya Soekarno. Pada akhirnya berbagai langkah strategis dan taktis pun terpaksa dilakukan, hingga Paguyuban Penghayat Kapribaden berdiri secara resmi. Upacara ritual dilakukan di Sanggar Sasono Andiroso, sedang upacaranya di Anjungan Mataram TMII. Tepatnya malam seneng Pahing 30 Juli 1978. Sebelum peresmian Putro-Putro Jakarta sowan Romo terlebih dahulu untuk mohon petunjuk.

Selanjutnya Dr. Wahyono diantar Bp. S. Hoetomo menggunakan kendaraan *kadhag* Hendra Yudianto, selama 2 bulan keliling ke daerah-daerah tanpa pulang untuk membentuk Paguyuban di daerah-daerah, sekaligus mengantarkan pengurus daerah mendaftarkan ke instansi pemerintah terkait di daerahnya. Ini merupakan suatu upaya agar Kapribaden diakui secara sah,

yang berarti sah kalau dijalani dan disampaikan kepada orang lain di wilayah hukum Republik Indonesia.³⁰

b. Hambatan Eksistensi

Polarisasi sejarah tidak lepas dari *blue printing* gejala politik, kuasa negara dan gempuran modernitas menjadi pengaruh dominan dalam mengkonstruksi periodisasi eksistensi aliran kebatinan khalayak, begitu juga dengan Paguyuban Penghayat Kapribaden.

Ukiran kontinuitas historis telah menjadi saksi atas embrio awal dalam perjuangan berdiri dan diresmikannya Kapribaden. Memang secara mendasar lahirnya Kapribaden kurang lebih sepuluh tahun setelah bangsa Indonesia merdeka. Tidak seperti sebagian aliran kebatinan-kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lain yang lahir jauh sebelum kemerdekaan, hingga sampai hati melegitimasi geneologi kepercayaan mereka senafas dengan semangat nasionalisme. Namun dalam persoalan ini tidak menjadi geram, karena secara jejak perjalanan sejarah Kapribaden juga berusaha mewujudkan semangat nasionalisme.

Nampaknya menjadi benang merah yang saling menyingkronkan bahwa perbedaan geneologi kelahiran diantara kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengalami

³⁰Sejarah singkat ini merupakan paparan langsung dari saksi sejarah pinisepuh Kapribaden, yakni Dr. Wahyono Raharjo GSW, MBA (Alm) dan Ibu Hartini Wahyono, sebagai pelaku sejarah. Paguyuban Penghayat Kapribaden, *Sejarah Berdirinya Paguyuban Penghayat Kapribaden*, (Jakarta Selatan: Paguyuban Penghayat Kapribaden, 2009), hlm. 5. Makalah pegangan Paguyuban, tentang paparan ini bisa juga dilihat di www.kapribaden.org

tantangan zaman. Khususnya tantangan yang berkejang pada masa peralihan periodisasi Orde lama, masa pemerintahan Soekarno ke Orde baru, masa pemerintahan Soeharto (1966-1998).

Perombakan dan pembakuan kebijakan menjadi ciri khas dari peralihan kuasa pemerintahan. Integrasi, relasi antara agama dan negara serta intervensi menjadi warna dominan dalam perbedaan orientasi yang terproyeksikan.

Bermuara pada simbiose negara-agama resmi. Pendefinisian agama yang ada di Indonesia pun diakuisi oleh agama dominan. Tentu yang demikian disisi lain dengan spontanitas memposisikan aliran kebatinan (kepercayaan) sulit diakui secara resmi oleh negara.

Akan tetapi keberadaan undang-undang pasal 29 yang menegaskan bahwa negara didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memiliki agamanya sendiri dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal demikian nyatanya telah menyulut multi-interpretasi mengenai term kepercayaan/kebatinan yang sampai pada kesimpulan bahwa kepercayaan/kebatinan yang ada sebelum kemerdekaan diasumsikan setraf dengan agama resmi. Sedangkan menurut agama islam, kepercayaan/kebatinan harus dibina dan

dikembalikan pada agama induk. Dalam persoalan inilah nampak islam ortodok versus islam kejawen (agama resmi versus kepercayaan). Bahkan dalam langkah yang serius lahirnya MUI merupakan intervensi agama dalam wajah legalitas hukum negara terhadap kepercayaan. Hingga pada akhirnya melahirkan Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).³¹

Secara mendasar, memang penguasa Orde lama maupun Orde baru memiliki genealogi yang sama dengan aliran kepercayaan atau kebatinan, yakni sama-sama berlatar belakang kultural jawa yang mengindikasikan adanya kedekatan ideologis.

Pada 1957 tatkala pemerintah Orde lama masih berkuasa, otoritas Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) melayangkan surat permohonan untuk menyetarakan status aliran kebatinan (kepercayaan) dengan agama resmi. Mengingat pendefinisian agama ketara bias agama semitis dan mereduksi serta mendikriminasi pendefinisian kepercayaan.

Gejala tersebut nampak berpijak dari adanya fragmentasi masyarakat yang berlatar belakang keagamaan tertentu ingin meredefinisikan nasionalisme yang berdimensi negara-agama. Diwarnai pula dengan adanya wacana politisasi agama dan agamasasi politik. Menjamurnya partai politik yang berbasis keagamaan sangat dominan dan tidak dapat dihindarkan.

³¹Anas Saidi dkk., *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, cet. 4, (Depok: Desantara, 2004), hlm. 10

Sebagai bentuk realisasinya, tercentuslah kebijakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun MPR pada masa Orde Baru, menyatakan bahwa paham keagamaan lokal digolongkan ke dalam aliran kepercayaan. Pada waktu itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar kembali kepada agama induk agamanya masing-masing. Maka pada masa pemerintahan Orde Baru, dikeluarkan kebijakan yang mengarahkan agama lokal bergabung dengan agama yang ajarannya mendekati agama induk (agama mayoritas).

Ketara jelas, yang demikian merupakan strategi dan instrik Soeharto untuk menjinakkan kalang islam yang konservatif. Sehingga mereka berada dibarisan politik yang digencarkan Soeharto. Padahal tatkala itu periodisasi pemerintahan Soeharto baru berjalan dua tahun, namun telah berhasil melarang lebih dari seratus organisasi aliran kepercayaan atau aliran kebatinan yang berhaluan kiri dan mengintervensi semua organisasi sosial-politik yang berkaitan dengan PKI ataupun ideologinya yang secara terbuka anti-islam.³²

Dalam kepemimpinan Soeharto, hubungan antara negara-agama yang sedemikian rupa menarik jurang pemisah antara agama resmi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang kian menganga. Bahkan secara privasi, ketegangan itu

³²Anas Saidi dkk., *Menekuk Agama...*, hlm. 15

dijadikan tunggangan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dalam pemerintahan. Sedemikian rumitlah tantangan perodesasi Orde baru yang dihadapi oleh kapribaden.

4. Legalitas Hukum Negara

Setelah diresmikan tanggal 30 Juli 1978 maka secara resmi didaftarkan keberadaannya pada pemerintah dan terdaftar di beberapa lembaga pemerintahan sebagai berikut:

- a. DEPDIBUD R.I. No. I. 099/F.3/N.1.1/ 1980
- b. DEPDAGRI memenuhi UU. No. 8 Tahun 1985
- c. Kejaksaan Agung R.I. No. 250 Tahun 1987
- d. Tanda Pemaparan Ajaran oleh DEPDIBUD R.I. No. 31/ F.6/F.5/1988
- e. Pengumuman Pemerintah tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Sah Tingkat Nasional, bernomor 324
- f. Surat Keterangan Terdaftar di DEPDAGRI No. 29/D.III.3/III/2008

Namun sayangnya hingga saat ini Paguyuban Penghayat Kapribaden masih belum mempunyai Sanggar sebagai tempat khusus untuk pertemuan, upacara ritual, peringatan hari-hari penting dan lain sebagainya.³³

³³*Ibid*, hlm. 38-41 dan juga dipaparkan dalam situs resmi Kapribaden www.kapribaden.org

5. Identitas Organisasi Spiritual

Sebagai salah satu organisasi spiritual yang diakui oleh negara, Paguyuban Penghayat Kapribaden berada di bawah naungan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Hal yang demikian berarti secara spontanitas menegaskan bahwa identitas Paguyuban Penghayat Kapribaden sebagai suatu organisasi spiritual yang berdimensi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seluk beluk istilah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kaca mata besar sejarah tidak lepas dari pergumulan status yang bermuara pada gejolak politisasi agama transnasional dan kebijakan pemerintah yang dibakukan. Geneologi identitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk penyempurnaan evolusi dari dua istilah sebelumnya, yakni “kepercayaan” dan “kebatinan” yang dianggap mampu merepresentasikan kepercayaan lokal masyarakat pribumi, khususnya religius yang dianut oleh masyarakat Jawa.³⁴

Secara legalitas konstitusional kenegaraan, penggunaan istilah kepercayaan telah lebih dahulu digunakan daripada istilah kebatinan. Rintisan istilah kepercayaan dicetuskan oleh Wongsonegoro dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kurang lebih sekitar satu bulan sebelum

³⁴Ahmad Choirul Rofiq, *Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo*, Jurnal Kodifikasi: STAIN Ponorogo, Vol. 8 No. 1 tahun 2014, hlm. 3

kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 13 Juli 1945.³⁵ Akan tetapi Departemen Agama lebih deterministik menggunakan istilah aliran kepercayaan tatkala merintis Biro PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat).³⁶

Sementara berkaitan dengan istilah kebatinan, terdapat banyak perspektif tokoh yang berusaha memformulasikan istilah kebatinan, diantara para tokoh tersebut ialah sebagai berikut:

Menurut Wongsonegoro sebagaimana yang dikutip oleh Ilyas dan Imam, mengemukakan bahwa kebatinan merupakan bentuk bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Kebatinan adalah cara ala Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebatinan di Indonesia, dalam peraktiknya dapat berupa tasawuf, ilmu kesempurnaan, theosofi, dan mistik. Di dalamnya tetap mengembangkan aspek *inner reality*, kenyataan rohani.³⁷

Kamil Kartapradja mendefinisikan istilah kebatinan dengan rumusan penganalogian yang ekuivalen demikian; jika geraknya badan jasmani disebut dengan olah raga maka geraknya badan rohani dinamai

³⁵Muhammad Damami, *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1973: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Lelagisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 55-56.

³⁶*Ibid*, hlm. 58

³⁷Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen, Sinkritisme, Symbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI), 2014), hlm. 38-39. Pengertian istilah kebatinan yang selaras demikian juga dikemukakan oleh Sumatri Mertodipuro sebagaimana yang tercantum dalam Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejawaen) dan Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1976), hlm. 21

olah batin atau kebatinan, jadi kebatinan itu adalah olah batin yang semacam apa pun.³⁸

M. Rasjidi menyebutkan bahwa sebutan “kebatinan” berasal dari bahasa Arab, yaitu “batin” (yang di dalam). Dapat dikatakan, kebatinan timbul pada zaman ketika kebudayaan Indonesia telah dipengaruhi agama Islam.³⁹

Warsito mengatakan bahwa kebatinan adalah kebudayaan spiritual dari keraton Jawa yang berasal dari zaman yang sudah sangat tua dan telah mengalami perkembangan.⁴⁰

Lain halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Aliran Kebatinan Perjalanan. Sebagaimana yang dimuat dalam Anggaran Dasar AKP menyatakan bahwa kebatinan berasal dari kata batin yang memperoleh awalan ke- dan akhiran -an, jadi kebatinan. Batin adalah masalah dalam. Disebut masalah dalam karena batin tidak tampak oleh mata kepala dan tidak dapat diraba. Manunggalnya lahir dan batin disebut sebagai diri. Selanjutnya dalam membuat contoh-contoh batin dinyatakan bahwa lahirnya otak, batinnya ingat; lahirnya mata, batinnya lihat; lahirnya telinga, batinnya dengar; lahirnya hidung, batinnya cium; lahirnya mulut, batinnya ucap; lahirnya hati, batinnya pikir; lahirnya tangan, batinnya raba; lahirnya kaki, batinnya langkah; dan lahirnya saraf, batinnya rasa. Dengan penjelasan ini, para penganutnya

³⁸Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), hlm. 60-61

³⁹M. Rasjidi, *Islam dan Kebatinan*, (Jakarta: Jajasan Islam Studi ClubIndonesia, 1967), hlm. 39 dan 48.

⁴⁰Warsito dkk., *Di Sekitar Kebatinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm.19.

menganggap bahwa kebatinan sebagai *kasunyatan* (kesunyataan), kebenaran berdasarkan segala apa yang pernah dilakukan, dirasakan, dan disaksikan oleh diri sendiri. Pernyataan ini, para penganut aliran kebatinan ingin menyatakan bahwa batin sebagai sumber hidup.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian Djojodigono yang kemudian diamini rintisannya oleh M. Rasjidi membedakan sekaligus menggolongkan sekian banyak aliran kebatinan yang ada di Indonesia menjadi empat sekte sebagai berikut:

- a. Aliran okultis adalah golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia.
- b. Aliran mistik adalah golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam yang baka sebelum manusia itu mengalami mati.
- c. Aliran theosofis adalah golongan yang berniat mengenal Tuhan dan menebus ke dalam rahasia Ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia atau yang dikenal dengan istilah *sangkan paraning dumadi*.

⁴¹Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2005), hlm. 13

- d. Aliran ethis, golongan yang berhasrat untuk menempuh budi luhur di dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling menghargai dan cinta kepada Tuhan.⁴²

Sedangkan Soemarno WS bersama ahli-ahli riset lain menyusun penggolongan berdasarkan sudut pandang yang berbeda, aliran-aliran kebatinan dibedakan sebagai berikut:

- a. Golongan kepercayaan perorangan atau kelompok yang terdiri dari satu atau dua orang yang melakukan kepercayaan untuk kepentingan diri pribadi tanpa usaha menyebar luaskan kepada orang lain.
- b. Golongan perguruan kepercayaan yang menerima murid atau memproganda ajarannya.
- c. Golongan perdukunan, dimana ilmu perdukunan dan pengobatan asli dipraktekkan bagi masyarakat yang memerlukan.⁴³

Apabila memperhatikan pengklasifikasian tersebut, kategorisasi aliran kebatinan yang dilabelkan oleh khalayak peneliti terhadap Paguyuban Penghayat Kapribaden, nampaknya lebih deterministik pada identitasnya sebagai golongan mistik dan theosofis. Yang bertujuan untuk mencapai kultuminasi kemanunggalan (*manunggaling kawula*

⁴²Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan...)*, hlm. 39

⁴³*Ibid.*, hlm. 39

gusti) melalui penghayatan makna realitas hidup yang sesungguhnya (*sangkan paraning dumadi*).

Menyadari kenyataan yang demikian, terdapat pula pandangan peneliti indonesianis yang tetap bersikukuh menggunakan identitas ganda dalam memandang Paguyuban Penghayat Kapribaden, yakni sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sekaligus aliran kebatinan. Seperti halnya kajian tentang “Spiritualitas Penghayat Ajaran Kapribaden” oleh Siti Fauziyah, yang termuat dalam jurnal *Religi*. Dimana Siti Fauziyah menyebutkan identitas Paguyuban Penghayat Kapribaden sebagai penghayat aliran kebatinan sekaligus penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴

Menjustifikasi identitas Paguyuban Penghayat Kapribaden sebagai kebatinan berarti dengan spontanitas telah berseberangan dengan pandangan sesepuh Paguyuban Penghayat Kapribaden. Herucokro Semono menegaskan melalui sabdanya bahwa Kapribaden “*dudu agama, dudu ngelmu, dudu kebatinan, dudu partai politik, dudu organisasi, melainkan Kasunyatan gelar klawan gulung*”, (bukan agama, bukan kebatinan, bukan partai politik, bukan organisasi, melainkan penghayatan hidup dengan roso, batin).⁴⁵

Dalam praktiknya, diantara sekian banyak yang menjadi Putro Romo terdapat pula mereka yang beragama resmi (baik itu beragama islam, kristen, hindu dan lain sebagainya). Selain itu, ada juga mereka

⁴⁴Untuk lebih jelas silahkan lihat Siti Fauziyah, *Spiritualitas Penghayat...* hlm. 13

⁴⁵Pedoman induk paguyuban kapribaden, *Wedharan Romo Semono Pitulas Tahun Mijil Kunci*, (Jakarta: tidak dipublikasi, 1986), hlm. 22

yang menjadikan ajaran Kapribaden pada hierarki tertentu sebagai kepercayaan.⁴⁶ Mungkin realitas inilah yang menjadi bukti konkret atas diberlakukannya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁶Nampaknya disatu sisi ajaran kapribaden mengalami fleksibilitas dalam pemaknaan oleh mereka yang telah berhasil menjadi Putro Romo.